

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BPR TJANDRA ARTHA LESTARI  
TAHUN 2025**



**TJANDRA ARTHA**

**PT BPR Tjandra Artha Lestari**  
*ALTRA BISNIS YANG AMAN DAN TERPERGAYA*

## Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
BAB I.....	2
BAB II.....	3
A. Ringkasan Hasil Penilaian ( <i>Self Assesstment</i> ) atas Penerapan Tata Kelola.....	3
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	3
2. Pelaksaaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	4
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	5
4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	6
5. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	6
6. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	7
7. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan berdasarkan RUPS.....	7
8. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	8
9. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun.....	8
10. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	8
11. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud).....	9
12. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi.....	9
13. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	9
14. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain.....	9
BAB III.....	10

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

PT. BPR Tjandra Artha Lestari berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola berdasarkan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkeonomian Rakyat dan Bank Perkeonomian Rakyat Syariah. Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Tjandra Artha Lestari mencakup lima prinsip yaitu :

**a) Keterbukaan**

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan antara lain : kondisi keuangan, keputusan, kebijakan dan pelayanan yang diungkapkan secara jelas, akurat dan tepat waktu.

**b) Akuntabilitas**

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban tiap posisi dalam organisasi sehingga pengelolaan berjalan efektif. Setiap unit kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas termasuk kewenangan, hak, dan kewajiban masing-masing pegawai yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi BPR serta melakukan pemeriksaan untuk memastikan keakuratan dalam mengelola BPR.

**c) Tanggung jawab**

Komitmen untuk mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan BPR yang sehat. BPR dalam kegiatan operasionalnya, harus berpegang dengan prinsip kehati-hatian dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**d) Independensi**

Memastikan pengelolaan BPR dilakukan secara profesional dan independen dari potensi tekanan akibat benturan kepentingan atau intervensi dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**e) Kewajaran**

Memastikan perlakuan yang adil dan setara dalam melindungi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai peraturan yang berlaku. BPR memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Tujuan penerapan Tata Kelola :

- Meningkatkan kinerja dan efisiensi BPR,
- Melindungi kepentingan *stakeholder*,
- Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,
- Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BPR,
- Meningkatkan kinerja BPR.

Laporan ini disusun sebagai salah satu wujud penerapan prinsip Tata Kelola berupa keterbukaan. Berikut kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2025.

## BAB II

### LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

#### A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assesstment*) atas Penerapan Tata Kelola

<b>Alamat : Jl. Patimura No. 49 D, Kupang Kota, Teluk Betung Utara - Bandar Lampung</b>
<b>No Telepon : (0721) 487111</b>
<b>Penjelasan Umum :</b> BPR Tjandra Artha Lestari sepanjang tahun 2025 berusaha menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR ini disusun untuk : memberi gambaran tentang BPR Tjandra Artha Lestari, melindungi pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) dan menjalankan kewajiban yang disyaratkan dalam POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
<b>Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesstment</i>) Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2025 :</b>  <p style="text-align: center;"><b>4 (KURANG BAIK),</b></p>
<b>Artinya :</b> Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip Tata Kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR.
<b>Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesstment</i>) Tata Kelola :</b>  BPR Tjandra Artha Lestari sepanjang tahun 2025 telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam seluruh aktivitas kegiatannya. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Direksi hanya 1 (satu) dan belum ada anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan.</li> <li>- Anggota Dewan Komisaris hanya 1 (satu) sejak November 2025.</li> <li>- Kinerja Bank mengalami penurunan pada tahun 2025.</li> </ul>

#### B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	<b>NIK</b>	: 1871125010710011
	<b>Nama</b>	: Susan Riana
	<b>Jabatan</b>	: Direktur Utama
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab :</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan dan bertanggung jawab untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.</li> <li>• Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian.</li> <li>• Berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.</li> <li>• Menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPR, Manajemen Resiko, dan</li> </ul>	

	<p>Kepatuhan secara terintegrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern.</li> <li>Wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain.</li> </ul>
<p><b>Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Direksi telah memenuhi hasil audit OJK sesuai batas waktu yang ditentukan.</li> <li>-Direksi telah menyusun action plan terkait arah bisnis ke depan secara terukur.</li> <li>-Direksi telah menerima karyawan Marketing percobaan.</li> <li>-Direksi telah mengajukan permohonan PKK calon Direksi ke OJK tanggal 17 Desember 2025.</li> <li>-Selama tahun 2025, Direksi telah membuka lowongan kerja melalui : website, instagram, dan jobstreet</li> </ul>	

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK	: 1671051504640002
	Nama	: Sutarjo
	Jabatan	: Komisaris Utama
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab :</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepetingan BPR dengan itikad baik dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran dasar dan/ atau Keputusan RUPS.</li> <li>Wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko serta kebijakan strategis BPR.</li> <li>Wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.</li> <li>Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, Audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain.</li> <li>Wajib menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan mengusulkan penetapan kebijakan tersebut dalam RUPS.</li> <li>Wajib menyusun kebijakan nominasi bagi Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan mengusulkan penetapan kebijakan tersebut kepada RUPS.</li> <li>Wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi.</li> </ul>	
<b>Rekomendasi kepada Direksi :</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengarahkan Direktur untuk menindaklanjuti kinerja bank pada tahun 2025.</li> <li>-Memberikan saran kepada Direktur untuk melengkapi struktur.</li> <li>-Untuk mencari strategi pemasaran kredit baru sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.</li> <li>-Tingkatkan kredit dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.</li> <li>-Untuk segera mengisi kekosongan SDM bagian kredit.</li> <li>-Follow up pemenuhan hasil audit OJK sesuai batas waktu yang ditentukan.</li> <li>-Menyusun action plan terkait arah bisnis ke depan secara terukur.</li> </ul>		

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit : <i>BPR Tjandra Artha Lestari tidak diwajibkan membentuk KOMITE</i>
	Tugas dan tanggung jawab : NIHIL
	Program Kerja : NIHIL
	Realisasi : NIHIL
	Jumlah Rapat : NIHIL
2.	Komite Pemantau Resiko : <i>BPR Tjandra Artha Lestari tidak diwajibkan membentuk KOMITE</i>
	Tugas dan tanggung jawab : NIHIL
	Program Kerja : NIHIL
	Realisasi : NIHIL
	Jumlah Rapat : NIHIL
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi : <i>BPR Tjandra Artha Lestari tidak diwajibkan membentuk KOMITE</i>
	Tugas dan tanggung jawab : NIHIL
	Program Kerja : NIHIL
	Realisasi : NIHIL
	Jumlah Rapat : NIHIL
4.	Komite Manajemen Resiko : <i>BPR Tjandra Artha Lestari tidak diwajibkan membentuk KOMITE</i>
	Tugas dan tanggung jawab : NIHIL
	Program Kerja : NIHIL
	Realisasi : NIHIL
	Jumlah Rapat : NIHIL
5.	Komite Lainnya : <i>BPR Tjandra Artha Lestari tidak diwajibkan membentuk KOMITE</i>
	Tugas dan tanggung jawab : NIHIL
	Program Kerja : NIHIL
	Realisasi : NIHIL
	Jumlah Rapat : NIHIL

#### b. Struktur, Keanggotan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Resiko	Remunerasi & Nominasi	Manajemen Resiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

##### a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Nominal Tahun Sebelumnya (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1.	1871125010710011	Susan Riana	Rp 0	Rp 0	0%

##### b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp.)	Nominal Tahun Sebelumnya (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1.	1671051504640002	Sutarjo	Rp. 0	Rp. 0	0%

##### c. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

###### i. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1.	1871125010710011	Susan Riana	-	-	0%

###### ii. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1.	1671051504640002	Sutarjo	-	-	-

#### 5. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

##### a. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1871125010710011	Susan Riana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

b. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
I	1671051504640002	Sutarjo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

6. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

a. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
I	1871125010710011	Susan Riana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

b. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
I	1671051504640002	Sutarjo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

7. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	258.404.782	2	200.400.000
2	Tunjangan	1	21.312.600	2	15.190.000
3	Tantiem	0	-	0	-
4	Kompensasi berbasis saham	0	-	0	-
5	Remunerasi lainnya	0	-	0	-
<b>Total Remunerasi</b>		<b>1</b>	<b>279.717.382</b>	<b>2</b>	<b>215.590.000</b>
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1	Perumahan	0	-	1 ✓	30.000.000
2	Transportasi	0	-	1 ✓	18.000.000
3	Asuransi Kesehatan	0	-	0	-
4	Fasilitas lainnya	0	-	1 ✓	3.600.000
<b>Total Fasilitas Lain</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 ✓</b>	<b>51.600.000</b>
<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>1</b>	<b>279.717.382</b>	<b>2 ✓</b>	<b>267.190.000</b>

\*) Tunjangan adalah pph 21 yang ditanggung perusahaan (Direksi dan Dewan Komisaris).

\*\*\*) Perumahan adalah tunjangan kos tiap bulan untuk Komisaris Utama.

\*\*\*\*) Transportasi adalah tunjangan travel dan makan di perjalanan pulang pergi Lampung-Palembang (Komisaris Utama).

\*\*\*\*\*) Fasilitas lainnya adalah tunjangan laundry (Komisaris Utama) tiap bulan.

## 8. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,80 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Direksi yang terendah (b)	0
Rasio gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,66 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,25 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,36 : 1

Catatan : Tidak termasuk tunjangan BPJS dan tidak termasuk tunjangan pph 21.

## 9. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	8 Januari 2025	2	-Mengarahkan Direktur untuk meningkatkan kinerja bank. -Memberikan saran kepada Direktur untuk melengkapi struktur.
2.	11 Maret 2025	2	-Saran kepada Direksi untuk meningkatkan strategi pemasaran kredit.
3.	26 Mei 2025	2	Saran kepada Direksi untuk meningkatkan kredit dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
4.	8 Juli 2025	2	Saran kepada Direktur Utama : -Untuk segera mengisi kekosongan SDM bagian kredit. -Follow up pemenuhan hasil audit OJK sesuai batas waktu yang ditentukan.
5.	18 Juli 2025	2	Mengarahkan Direktur untuk melakukan segera memenuhi struktur organisasi yang masih kosong.
6.	23 September 2025	2	Saran kepada Direksi agar kekosongan pengurus segera dipenuhi dan ditindaklanjuti.
7.	8 Oktober 2025	2	Saran kepada Direksi untuk meningkatkan penyaluran kredit.

## 10. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	1671051504640002	Sutarjo	7	-	100
2	1871050104510003	Alesius Bunawan	7	-	100

Note : Bp. Alesius Bunawan berhenti menjabat sebagai Komisaris sejak 3 November 2025.

### 11. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

### 12. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

### 13. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp)	Ket
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 14. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
	-	-	-	-	-	-

### BAB III

## KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR TJANDRA ARTHA LESTARI  
Posisi : Tahun 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	4	5	5	0	3	5	5	1	2	1	4	5	4
Predikat Komposit	4												

#### Kesimpulan Akhir

Berdasarkan analisa terhadap : Aspek pemegang saham; Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi; Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris; Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; Penangan benturan kepentingan; Penerapan fungsi kepatuhan; Penerapan fungsi audit intern; Penerapan fungsi audit ekstern; Penerapan Manajemen Resiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern; Batas maksimum pemberian kredit BPR; Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan Rencana bisnis BPR terhadap :

- Struktur dan tata struktur Tata Kelola
- Proses Tata Kelola
- Hasil Tata Kelola

**didapatkan Nilai Peringkat Komposit = 4 (KURANG BAIK)**

Artinya :

Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip Tata Kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR.

#### Faktor Positif

Berikut faktor positif dalam ketiga faktor :

- Struktur dan tata struktur Tata Kelola
  - Komposisi dan persyaratan Pemegang Saham sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - BPR memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Resiko serta Pejabat Eksekutif Audit Intern sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - Penugasan Audit kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan aturan yang disyaratkan.
  - BPR telah memiliki aturan terkait BMPK.
  - Tersedianya sistem pelaporan Keuangan dan non Keuangan yang didukung oleh sistem informasi yang memadai.
- Proses Tata Kelola
  - Pengambilan keputusan para Pemegang Saham melalui RUPS.
  - Dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan BPR menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan RUPS.
  - Proses pemberian kredit kepada pihak terkait, telah memenuhi peraturan mengenai BMPK dan tidak ada pelanggaran BMPK.
  - BPR telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh laporan sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Tata Kelola <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham dalam RUPS.</li> <li>- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.</li> <li>- BPR telah menyampaikan Laporan terkait Kepatuhan dan Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>- Hasil Audit Kantor Akutan Publik (KAP) dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.</li> <li>- BPR tidak melanggar atau melampaui BMPK.</li> <li>- Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu ke Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Faktor Negatif</b>
<p>Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Direksi hanya 1 (satu) dan belum ada anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan.</li> <li>- Anggota Dewan Komisaris hanya 1 (satu) sejak November 2025.</li> <li>- Kinerja Bank mengalami penurunan pada tahun 2025.</li> </ul>

Bandar Lampung, 22 April 2026

Menyetujui,





Susan Riana                      Sutarjo  
Direktur Utama                      Komisaris Utama



**BANK TJANDRA ARTHA**

PT BPR Tjandra Artha Lestari

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN  
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola  
PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2025**

Telah disusun dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Persektorial Rakyat dan Bank Persektorial Rakyat Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Persektorial Rakyat.

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi gambaran umum Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Persektorial Rakyat (BPR).

Bandar Lampung, 22 April 2026

Menyetujui,

  
Susan Riana  
Direktur Utama

  
  
Sutarjo  
Komisaris Utama



**BANK TJANDRA ARTHA**

**PT BPR Tjandra Artha Lestari**

Nomor : 046/BPR-TJA/DIR/IV/2026

Lampiran :-

Kepada YTH.

-Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung  
-Pimpinan PERBARINDO  
-Pimpinan Majalah Media BPR

Di Tempat

Perihal : Penyampaian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2025

Dengan hormat,

Bersama ini, kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2025.

Demikianlah surat ini dibuat, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 22 April 2026

Hormat kami,

  


Direktur Utama